

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Kemajuan dan Keberhasilan Pembangunan Perkebunan di Jawa Timur

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pembangunan perkebunan di Jawa Timur sangat bervariasi antar kabupaten. Kabupaten Malang mencatat keberhasilan tertinggi dengan capaian Indeks Pembangunan Perkebunan (IPP) sebesar 65,14, yang didominasi oleh kekuatan pada dimensi usaha seperti luas lahan, jumlah tenaga kerja, dan volume produksi. Kabupaten Sumenep menempati posisi kedua dengan nilai IPP 59,98, yang terutama ditopang oleh tingginya peran kelembagaan melalui penyuluhan. Hal ini mencerminkan bahwa keberhasilan pembangunan perkebunan tidak hanya ditentukan oleh faktor fisik dan ekonomi, tetapi juga oleh efektivitas dukungan kelembagaan dan sosial. Sebaliknya, kabupaten seperti Sidoarjo, Bangkalan, dan Gresik menunjukkan performa yang rendah akibat minimnya kegiatan usaha perkebunan dan lemahnya dukungan institusional.

2. Pengelompokan Kabupaten Berdasarkan Indikator-Indikator Indeks Pembangunan Perkebunan

Melalui analisis faktor dan pendekatan indeks komposit, delapan indikator utama dikelompokkan menjadi dua faktor: usaha perkebunan dan penyuluhan. Hasilnya, kabupaten-kabupaten di Jawa Timur dapat diklasifikasikan ke dalam lima kelompok berdasarkan tingkat IPP: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Kabupaten Malang dan Sumenep tergolong sangat tinggi; Jember, Lumajang, dan Blitar termasuk dalam kategori tinggi; sedangkan wilayah seperti Tuban, Bangkalan, dan

Sidoarjo masuk dalam kategori sangat rendah. Pola pengelompokan ini mencerminkan ketimpangan spasial dalam pembangunan perkebunan, di mana daerah dengan dukungan agroklimat yang baik dan akses terhadap penyuluhan cenderung memiliki nilai indeks yang lebih tinggi.

3. Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Perkebunan di Jawa Timur

Hasil penelitian menegaskan bahwa peningkatan pembangunan perkebunan perlu dilakukan secara holistik dengan memperkuat dua pilar utama: kapasitas usaha dan kualitas penyuluhan. Kabupaten dengan skor rendah perlu mendapat prioritas intervensi, seperti peningkatan akses penyuluhan, penguatan kelembagaan petani, dan pengembangan infrastruktur pertanian. Selain itu, pendekatan berbasis bukti seperti IPP dapat dijadikan alat perencanaan yang efektif untuk menetapkan arah kebijakan secara kontekstual sesuai karakteristik lokal tiap kabupaten. Pemerintah provinsi dan daerah diharapkan dapat mengintegrasikan hasil indeks ini dalam perumusan strategi pembangunan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Pembangunan perkebunan yang berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur memerlukan kolaborasi aktif dari berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah, penyuluh pertanian, serta rumah tangga pelaku usaha perkebunan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Indeks Pembangunan Perkebunan (IPP), beberapa saran dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, perlu pendalaman yang lebih komprehensif dalam pemilihan dan penyesuaian indikator yang digunakan dalam perhitungan IPP. Penyempurnaan indikator akan meningkatkan validitas dan reliabilitas indeks, serta memperkuat daya gunanya sebagai alat ukur

kemajuan pembangunan perkebunan. Pengukuran IPP agar dilakukan secara berkala, idealnya setiap tahun atau dalam periode tertentu, untuk memberikan gambaran tren perkembangan pembangunan perkebunan secara dinamis. Hal ini memungkinkan identifikasi lebih dini terhadap wilayah yang memerlukan intervensi kebijakan atau pendampingan teknis. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi hubungan kausal antara komponen-komponen IPP dengan hasil pembangunan riil di lapangan, guna mengembangkan model prediktif berbasis IPP yang lebih aplikatif.

2. Bagi pemerintah daerah, Indeks Pembangunan Perkebunan dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen perencanaan dan evaluasi pembangunan sektor perkebunan di tingkat kabupaten/kota. Pemerintah daerah disarankan menjadikan hasil IPP sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, alokasi anggaran, dan prioritas pembangunan perkebunan. Kabupaten/kota yang tergolong dalam kelompok IPP sedang dan tinggi perlu diberikan dukungan program yang bersifat akseleratif agar potensi yang telah dimiliki dapat berkembang secara optimal. Sebaliknya, daerah dengan kategori IPP rendah memerlukan intervensi khusus melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan infrastruktur penunjang, serta pemberdayaan petani dan rumah tangga perkebunan melalui penyuluhan dan pelatihan terpadu.
3. Bagi penyuluh perkebunan, diharapkan berperan aktif dalam mengomunikasikan pentingnya pembangunan perkebunan berkelanjutan dan berbasis data kepada pelaku di lapangan. Hasil IPP dapat digunakan untuk merancang pendekatan penyuluhan yang lebih terarah sesuai dengan kelemahan indikator di masing-masing wilayah. Sedangkan bagi rumah tangga perkebunan, diharapkan meningkatkan produktivitas dan

keberlanjutan usahanya melalui pemanfaatan inovasi, teknologi tepat guna, serta kemitraan yang inklusif dengan pemerintah maupun sektor swasta.

5.3 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Perkebunan di Jawa Timur

1. Kebijakan Umum Provinsi (Makro dan Lintas Kabupaten)
 - Integrasi IPP ke dalam RPJMD dan Renstra Dinas Perkebunan untuk perencanaan dan penganggaran berbasis data sektoral.
 - Penerapan kebijakan pembangunan diferensial berbasis klaster IPP (sangat rendah – sangat tinggi).
 - Penyusunan dashboard pemantauan IPP interaktif berbasis spasial untuk mendukung evaluasi dan pengambilan keputusan berbasis bukti.
 - Peningkatan anggaran untuk infrastruktur dasar pertanian seperti jalan tani, irigasi mikro, dan gudang pascapanen.
 - Penerapan regulasi dan insentif untuk investasi hijau (green investment) pada komoditas perkebunan berkelanjutan.
2. Kebijakan untuk Kabupaten IPP Sangat Rendah dan Rendah
 - Revitalisasi kelembagaan petani dan pembentukan koperasi desa berbasis komoditas.
 - Peningkatan penyuluhan intensif melalui pelatihan teknis, pembinaan rutin, dan pendampingan berbasis desa.
 - Perluasan akses lahan produktif melalui sinergi dengan kebijakan reforma agraria.
 - Program subsidi input produksi awal bagi petani pemula atau petani baru.
 - Peningkatan literasi digital petani melalui pelatihan e-agrikultur dasar.

3. Kebijakan untuk Kabupaten IPP Sedang
 - Penguatan kapasitas penyuluh melalui pelatihan lanjutan dan sertifikasi kompetensi.
 - Digitalisasi pertanian melalui platform penyuluhan online (e-petani) dan pelaporan produksi real-time.
 - Penciptaan kawasan agribisnis terpadu di tingkat kecamatan.
 - Membangun jejaring pasar lokal dan regional untuk komoditas unggulan.
 - Pendanaan khusus untuk peningkatan teknologi produksi dan pengolahan sederhana.
4. Kebijakan untuk Kabupaten IPP Tinggi dan Sangat Tinggi
 - Penguatan hilirisasi dan industri pascapanen (pengemasan, fermentasi, pengeringan) di tingkat desa dan kecamatan.
 - Mendorong penciptaan merek lokal (branding) dan sertifikasi mutu untuk komoditas unggulan (kopi, tembakau, cengkeh).
 - Pengembangan agrowisata berbasis perkebunan dengan dukungan Dinas Pariwisata dan UMKM.
 - Kemitraan strategis dengan pelaku industri dan eksportir melalui skema contract farming.
 - Penguatan ekosistem inovasi melalui kolaborasi pentahelix (pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, media).
5. Rekomendasi Khusus Monitoring dan Evaluasi
 - Evaluasi berkala nilai IPP setiap tahun sebagai dasar penyesuaian alokasi program.
 - Publikasi terbuka IPP dan status perkembangan kabupaten untuk mendorong transparansi dan kompetisi positif.

- Audit efektivitas kebijakan berdasarkan perubahan IPP dalam periode 2–3 tahun.

5.4 Implikasi Penelitian

Setiap hasil penelitian ilmiah tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengetahuan akademik, tetapi juga menjadi dasar penting bagi pengambilan keputusan praktis, khususnya dalam konteks pembangunan wilayah. Penelitian mengenai Indeks Pembangunan Perkebunan (IPP) di Provinsi Jawa Timur tahun 2023 ini menghasilkan informasi kuantitatif dan spasial yang menggambarkan kondisi aktual sektor perkebunan di berbagai kabupaten/kota. Melalui analisis dua faktor utama—yakni faktor usaha perkebunan dan penyuluhan perkebunan—diperoleh gambaran tentang ketimpangan pembangunan antar wilayah dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan pertanian sub-sektor perkebunan.

Oleh karena itu, implikasi penelitian ini penting untuk dibahas secara menyeluruh agar temuan yang diperoleh tidak berhenti pada tataran deskriptif, tetapi dapat diinterpretasikan secara teoritis untuk memperkaya kajian keilmuan, serta secara praktis untuk memberikan masukan strategis bagi pemangku kepentingan. Implikasi teoritis akan menunjukkan relevansi dan kontribusi penelitian terhadap pengembangan konsep atau teori yang telah ada, sedangkan implikasi praktis akan berfokus pada rekomendasi atau arah kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pihak terkait lainnya dalam upaya meningkatkan pembangunan sektor perkebunan secara berkelanjutan.

5.4.1 Implikasi Teoritis

Hasil penelitian mengenai Indeks Pembangunan Perkebunan (IPP) di Provinsi Jawa Timur tahun 2023 memperkaya wawasan teoretis dalam studi pembangunan wilayah, agribisnis, serta kebijakan pertanian regional. Secara teoritis, temuan ini

menguatkan relevansi pendekatan multidimensional index dalam mengukur keberhasilan pembangunan sektor perkebunan. Indeks yang menggabungkan faktor usaha dan penyuluhan mencerminkan kompleksitas pembangunan sektor primer, yang tidak hanya bergantung pada input produksi, tetapi juga pada transfer pengetahuan dan kapabilitas sumber daya manusia melalui penyuluhan. Selain itu, pola sebaran IPP yang tidak merata dan menciptakan klaster-klaster pembangunan menunjukkan adanya dinamika spasial yang sejalan dengan teori ketimpangan regional (regional disparity theory), yang menyatakan bahwa pembangunan cenderung terkonsentrasi pada wilayah dengan akses lebih besar terhadap infrastruktur, kelembagaan, dan pasar. Hal ini juga mendukung konsep cumulative causation dari Gunnar Myrdal, yang menyebut bahwa wilayah yang sudah maju cenderung terus berkembang, sedangkan yang tertinggal mengalami stagnasi. Dalam konteks penyuluhan, temuan bahwa beberapa daerah memiliki nilai penyuluhan yang tinggi tetapi IPP rendah menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap efektivitas program penyuluhan, sehingga teori difusi inovasi dalam pertanian perlu dikaji ulang, terutama pada aspek adopsi teknologi dan perubahan perilaku petani. Penelitian ini juga memberikan dasar bagi penyempurnaan teori indeks pembangunan sektoral, di mana indikator-indikator seperti kualitas kelembagaan lokal, dukungan logistik, integrasi pasar, dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dapat dimasukkan dalam perhitungan indeks pada penelitian lanjutan.

5.4.2 Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil IPP Jawa Timur tahun 2023 memberikan informasi strategis bagi pengambil kebijakan di tingkat pemerintah daerah, khususnya yang terkait dengan sektor perkebunan seperti Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, dan Bappeda kabupaten/kota. Pertama, hasil penelitian menunjukkan disparitas

pembangunan yang nyata antara kabupaten dengan IPP sangat rendah seperti Sidoarjo, Bangkalan, dan Gresik, dengan kabupaten ber-IPP sangat tinggi seperti Malang dan Sumenep. Hal ini menuntut pendekatan pembangunan yang tidak seragam, melainkan berbasis kebutuhan lokal (*tailor-made policy*), di mana daerah tertinggal diberi perhatian khusus melalui intervensi anggaran, penguatan kelembagaan, serta program afirmatif seperti intensifikasi penyuluhan dan pemberdayaan petani. Kedua, bagi pemerintah daerah, IPP dapat digunakan sebagai alat bantu dalam menyusun rencana strategis sektoral perkebunan, seperti Rencana Induk Pengembangan Perkebunan Daerah (RIPPD), termasuk dalam mengidentifikasi kabupaten prioritas intervensi. Ketiga, hasil ini juga penting untuk merumuskan sistem insentif berbasis kinerja pembangunan perkebunan antar daerah, sebagai mekanisme kompetisi sehat dalam mendorong inovasi dan efisiensi layanan publik. Kabupaten seperti Malang dan Sumenep dapat dijadikan studi kasus atau *benchmarking site* untuk transfer pengetahuan antar daerah. Keempat, pada level mikro, hasil ini juga dapat dimanfaatkan untuk merancang ulang kurikulum pelatihan penyuluhan, menyesuaikan metode komunikasi dengan karakteristik petani di masing-masing wilayah, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor, seperti dengan perguruan tinggi dan swasta, untuk meningkatkan nilai tambah produk perkebunan lokal. Terakhir, hasil IPP juga sangat berguna untuk agenda *evidence-based policymaking*, di mana data hasil penelitian digunakan sebagai dasar justifikasi kebijakan dan program kerja tahunan. Untuk penelitian selanjutnya, hasil ini memberikan pijakan untuk menggali lebih jauh faktor-faktor eksternal lain seperti digitalisasi pertanian, peran lembaga keuangan mikro, serta resistensi sosial terhadap inovasi, yang berpengaruh pada efektivitas pembangunan perkebunan secara menyeluruh.